

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi berperan sebagai salah satu tolak ukur utama dalam menilai kemajuan suatu wilayah. Dalam studi ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai indikator yang menunjukkan besarnya perubahan kegiatan ekonomi suatu daerah pada rentang waktu setahun jika dibandingkan tahun kemarin (Sukirno, 2017). Peningkatan kapasitas produksi yang tercermin melalui peningkatan pendapatan nasional merupakan esensi dari pertumbuhan ekonomi. Sebuah negara dianggap suatu perekonomian dianggap mengalami perkembangan jika Produk Nasional Bruto secara riil mengalami kenaikan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan. Tingginya pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta yang berpotensi untuk memperkuat kemampuan pembelian masyarakat serta mendorong aktivitas investasi. Meskipun begitu, apabila tidak disertai dengan pembagian yang adil dan merata, pertumbuhan yang tinggi juga dapat memperlebar kesenjangan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena mencerminkan kemajuan suatu daerah atau negara dalam meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, serta mendorong pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mankiw (2003), pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan kunci untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif. Untuk melihat perekonomian yang baik dalam suatu negara salah

satunya lewat tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil dalam jangka panjang.

Analisis pertumbuhan ekonomi diukur melalui pemanfaatan data PDRB, yakni Produk Domestik Regional Bruto yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Indikator ini menunjukkan keseluruhan nilai tambahan yang diciptakan oleh beragam sektor perekonomian di wilayah tersebut.. Dalam analisis pertumbuhan ekonomi, PDRB berdasarkan harga konstan lebih umum digunakan karena dapat mengindikasikan perubahan kinerja ekonomi secara nyata tanpa terpengaruh oleh variasi harga. PDRB mencerminkan total jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah pada rentang waktu yang ditentukan.

**Grafik 1. 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Persen)**



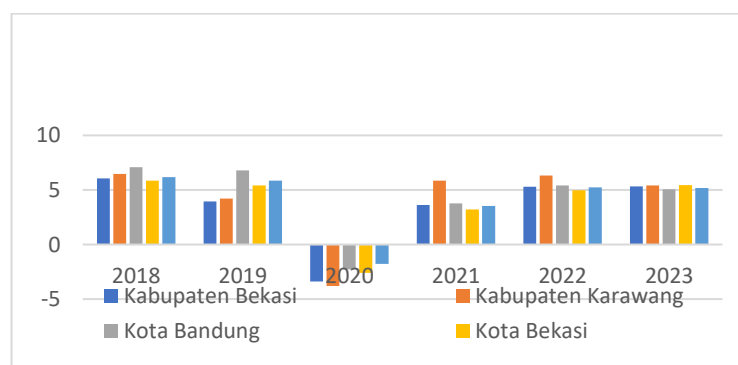
Sumber: Lampiran 1. Data Variabel Dependen dan Independen

Pertumbuhan PDRB Jawa Barat selama periode 2018–2023 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Di tahun 2018, ekonomi Jawa Barat mencatat

pertumbuhan mencapai tingkat 5,65%, tetapi sempat melambat hingga 5,02% pada tahun 2019. Pertumbuhan menurun sebesar 2,52% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Walaupun demikian, pada 2021 ekonomi Jawa Barat mulai membaik dengan pertumbuhan positif mencapai 3,75 persen, bahkan kembali menguat pada 2022 hingga mencapai 5,45 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan tetap stabil di angka 5,00 persen, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun lalu.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang fluktuatif itu tak terlepas dari peran kabupaten/kota yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB provinsi. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik, lima wilayah dengan kontribusi terbesar. Wilayah-wilayah tersebut memiliki fondasi ekonomi yang kokoh, seperti sektor industri manufaktur di Kabupaten Bekasi dan Karawang, pusat perdagangan dan layanan di Kota Bandung, serta fungsi Kota dan Kabupaten Bekasi serta Kabupaten Bogor sebagai zona dukung ekonomi Jabodetabek

Grafik 1. 2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Persen)



Sumber: Lampiran 1. Variabel Dependen dan Independen

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi di lima daerah Jawa Barat, terlihat bahwa pada tahun 2018–2019 pertumbuhan ekonomi masih cukup stabil dengan

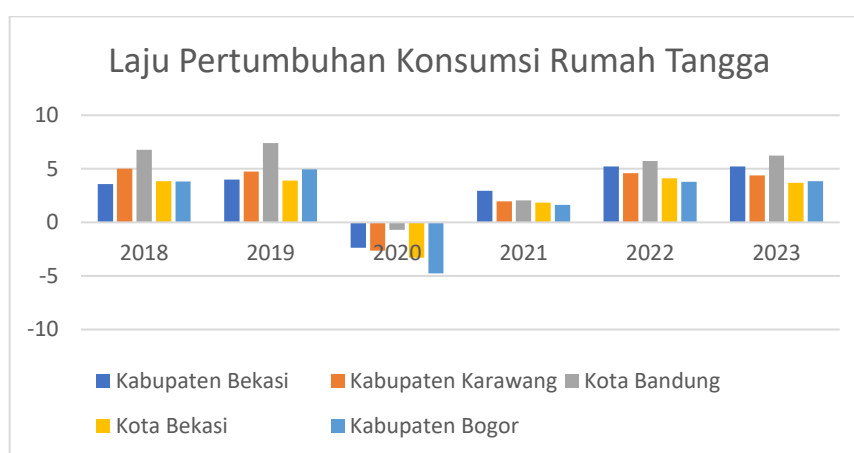
kisaran 5–7 persen, di mana Kota Bandung mencatat angka tertinggi sebesar 7,08 persen pada 2018. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi yang parah pada tahun 2020 di semua wilayah, dengan Kabupaten Karawang (-3,80 persen) dan Kabupaten Bekasi (-3,39 persen) mengalami penurunan terbesar. Seiring pemulihan ekonomi, tahun 2021–2023 menunjukkan tren positif, meskipun belum mampu kembali ke level sebelum pandemi. Kabupaten Karawang mencatat pemulihan paling kuat dengan pertumbuhan tertinggi pada 2021 (5,85 persen) dan 2022 (6,31 persen), sedangkan daerah lain seperti Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor menunjukkan pemulihan yang lebih moderat. Secara keseluruhan, pola ini menggambarkan adanya guncangan besar di tahun 2020 yang diikuti pemulihan bertahap, dengan variasi kecepatan pemulihan antar daerah yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi masing-masing wilayah.

Menurut John Maynard Keynes, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat, dimana konsumsi rumah tangga menjadi salah satu faktor utamanya. Permintaan akan produk dan layanan meningkat seiring dengan konsumsi, yang mendorong produksi dan terciptanya lapangan kerja. Sebaliknya, saat konsumsi melemah, seperti pada tahun 2020, aktivitas ekonomi terhambat dan pertumbuhan melambat. Pemulihan ekonomi yang terjadi pada 2021 dan 2022 menunjukkan bagaimana konsumsi yang kembali meningkat mampu mengerakkan kembali perekonomian, sejalan dengan teori Keynesian yang menekankan pentingnya daya beli masyarakat dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Mankiw (2014) menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga ini merupakan bagian terbesar dari PDB dan penting dalam menentukan seberapa besar permintaan agregat dalam perekonomian. Peningkatan pengeluaran rumah tangga

untuk berbagai barang dan jasa akan mendorong produsen meningkatkan kapasitas produksinya, yang selanjutnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga, perubahan pola seluruh tingkat aktivitas ekonomi dapat berdampak secara signifikan oleh konsumsi rumah tangga.

**Grafik 1. 3 Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga 5
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Persen)**



Sumber: Lampiran 1. Variabel Dependen dan Independen

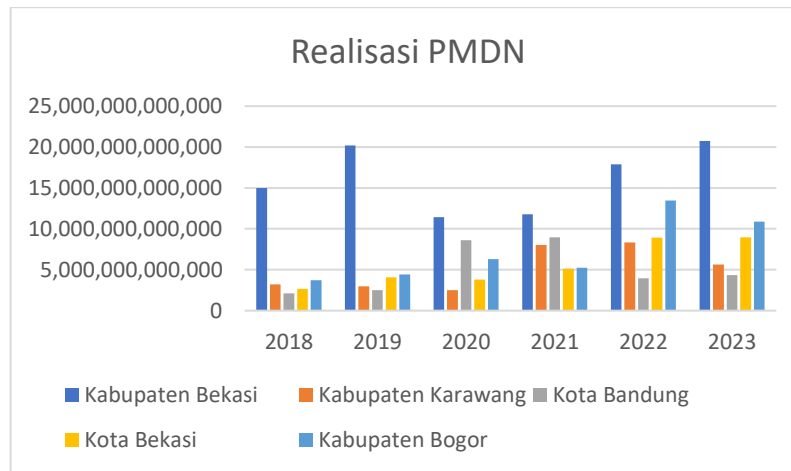
Berdasarkan data laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga dilima kabupaten/kota Jawa Barat selama periode 2018–2023, terlihat pola yang sejalan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, di mana sebelum pandemi COVID-19 tren pertumbuhan relatif stabil dengan kisaran yang bervariasi antarwilayah. Pandemi pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi pada seluruh wilayah, menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Namun, pada periode pasca pandemi (2021–2023), konsumsi rumah tangga kembali meningkat seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi, meskipun laju pertumbuhan di tiap daerah tidak merata. Kota Bandung cenderung mencatat pemulihan lebih kuat dibandingkan wilayah lain, sementara Kabupaten Bogor dan

Kota Bekasi menunjukkan pemulihan yang lebih moderat. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat daya beli masyarakat serta struktur ekonomi lokal sangat memengaruhi dinamika konsumsi rumah tangga, yang sekaligus menjadi motor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut teori Keynes, permintaan agregat termasuk konsumsi rumah tangga memiliki peranan penting dalam menjaga pertumbuhan serta kestabilan perekonomian. Permintaan terhadap produk dan layanan akan meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi sehingga memacu aktivitas produksi, mendorong investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta menggerakkan berbagai sektor terkait lainnya yang pada akhirnya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuat konsumsi layak diteliti sebagai variabel utama, karena mencerminkan daya beli masyarakat, tingkat kesejahteraan, dan kestabilan permintaan domestik yang berkelanjutan.

Konsumsi rumah tangga yang meningkat tidak hanya menandakan kenaikan daya beli masyarakat, tetapi juga menciptakan insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan investasi. Ketika permintaan barang dan jasa meningkat, perusahaan akan terdorong untuk memperluas kapasitas produksinya dengan melakukan investasi pada aset tetap, teknologi, dan infrastruktur produksi. Dengan kata lain, konsumsi rumah tangga yang kuat menjadi sinyal positif bagi iklim investasi di daerah, karena investor melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dari permintaan pasar yang terus tumbuh. Oleh karena itu, investasi menjadi variabel penting yang berperan dalam memperkuat dampak konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Grafik 1. 4 Realisasi PMDN 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah)



Sumber: Lampiran 1. Variabel Dependen dan Independen

Berdasarkan data Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lima kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2018–2023, terlihat bahwa Kabupaten Bekasi mendominasi dengan nilai PMDN tertinggi dan tren yang terus meningkat, mencerminkan posisinya sebagai pusat industri dan kawasan strategis penopang perekonomian Jawa Barat. Kabupaten Karawang mengalami penurunan pada 2019–2020, namun melonjak tajam pada 2021 hingga mencapai lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, sebelum kembali melemah pada 2023. Kota Bandung menunjukkan lonjakan besar pada 2020 dan 2021, meskipun terjadi penurunan signifikan pada 2022, yang mengindikasikan fluktuasi minat investasi di sektor jasa dan perdagangan. Kota Bekasi memperlihatkan peningkatan konsisten, terutama pada 2022 dengan hampir dua kali lipat nilai dari tahun sebelumnya, menegaskan daya tariknya sebagai kota penyangga Jakarta. Sementara itu, Kabupaten Bogor mencatat pertumbuhan pesat pada 2020–2022, namun kembali menurun di 2023. Secara keseluruhan, tren PMDN ini menunjukkan bahwa wilayah dengan basis industri dan kawasan metropolitan lebih menarik bagi investor, namun masih

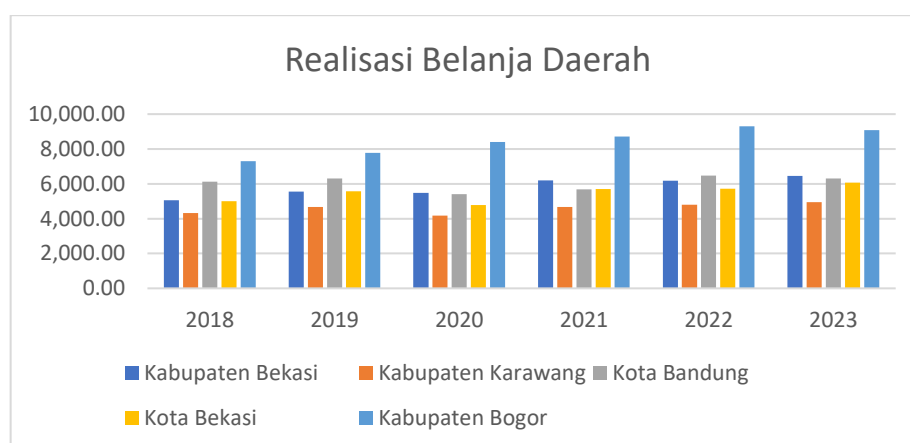
menghadapi fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional maupun global.

Investasi ini menjadi indikator penting bagi keberlanjutan pertumbuhan karena berkontribusi dalam menambah kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Hal ini sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi serta faktor eksternal yang mempengaruhi investasi, seperti kebijakan pemerintah, stabilitas makro ekonomi, dan faktor global.

Ini merupakan salah satu faktor kunci yang berperan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun investasi secara umum baik PMDN maupun PMA memegang peranan strategis, dalam konteks dinamika ekonomi Indonesia, PMDN menunjukkan kestabilan yang lebih konsisten. Stabilitas dan pertumbuhan positif PMDN ini mengindikasikan bahwa investor domestik memiliki kepercayaan yang lebih kuat. Penelitian yang dilakukan oleh Karina Dewi Saputri dan Candra Fajri Ananda (2023) juga memperkuat pandangan ini, di mana PMDN terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, sedangkan PMA tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Merujuk pada hasil tersebut, analisis terhadap PMDN menjadi signifikan karena tidak hanya menunjukkan stabilitas kinerja investasi, tetapi juga memberikan pengaruh langsung serta berkesinambungan terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri, khususnya di tingkat daerah. Dengan demikian, mengidentifikasi pengaruh yang mempengaruhi realisasi PMDN diperlukan untuk perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif dan berwawasan jangka panjang.

Investasi akan berjalan lebih optimal apabila didukung oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang kondusif, serta pelayanan publik yang efisien hal-hal yang sebagian besar merupakan hasil dari alokasi belanja daerah. Dengan kata lain, belanja daerah berfungsi sebagai fondasi pendukung yang menciptakan iklim usaha yang sehat bagi investor. Oleh karena itu, untuk untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang elemen-elemen yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, perlu dianalisis pula bagaimana belanja daerah berkontribusi sebagai instrumen fiskal pemerintah dalam mendukung aktivitas ekonomi di daerah.

**Grafik 1. 5 Belanja Daerah 5 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah)**



Sumber: Lampiran 1. Variabel Dependen dan Independen

Terlihat adanya dinamika yang cukup fluktuatif seiring kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal daerah. Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor konsisten mencatat realisasi belanja tertinggi dibanding wilayah lain, masing-masing mencapai Rp6,44 triliun dan Rp9,07 triliun pada 2023, mencerminkan besarnya kebutuhan belanja daerah dalam menopang pembangunan serta pelayanan publik di wilayah dengan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kabupaten

Karawang dan Kota Bekasi mengalami kecenderungan meningkat, meskipun fakta bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pada tahun 2020, sebelum akhirnya kembali mengalami pemulihan pada periode selanjutnya. Kota Bandung mengalami penurunan signifikan pada 2020, namun realisasi belanjanya kembali naik hingga mencapai Rp6,47 triliun di 2022 sebelum sedikit menurun pada 2023. Secara umum, pola belanja daerah kelima wilayah ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah cenderung meningkat dalam jangka panjang meski sempat terganggu pandemi, dan hal ini menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.

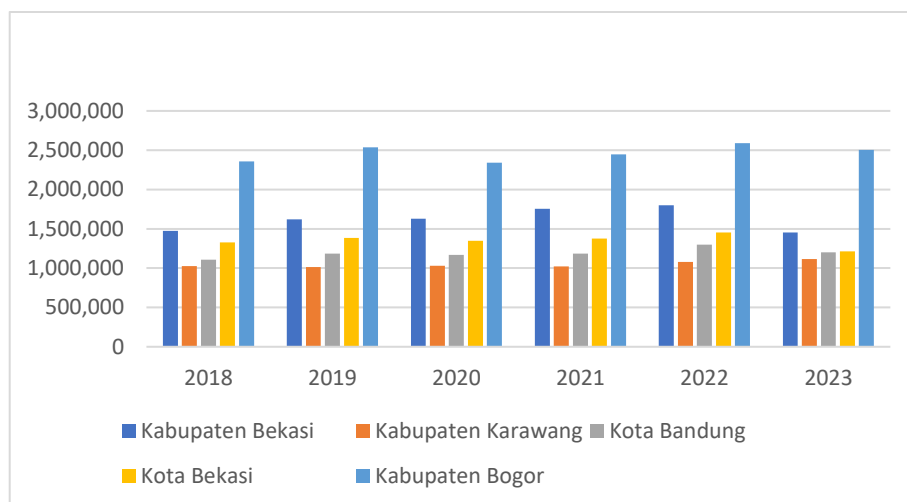
Belanja daerah merupakan instrumen fiskal utama dalam konteks desentralisasi yang memungkinkan pemerintah daerah mengelola keuangan secara mandiri untuk mendorong pembangunan ekonomi wilayahnya. Belanja daerah mencerminkan arah prioritas pembangunan dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama melalui pengeluaran untuk sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta dukungan terhadap iklim investasi.

Menurut pandangan Keynesian, belanja pemerintah—dalam konteks ini belanja daerah—memiliki peran penting dalam mendorong *Agregate Demand* / permintaan agregat, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan produksi dan ekspansi ekonomi. Oleh karena itu, untuk menentukan sejauh mana pengeluaran regional mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diperlukan sebuah penelitian, khususnya di Provinsi Jawa Barat yang memiliki alokasi belanja relatif besar secara nasional. Jawa Barat adalah salah satu daerah paling signifikan secara ekonomi di Indonesia, oleh karena itu pengeluaran daerahnya tinggi memegang peranan

strategis dalam menunjang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Jawa Barat memiliki tantangan demografis dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang cukup besar sebagai daerah dengan populasi yang padat dan wilayah yang luas. Dengan demikian, peningkatan belanja daerah yang signifikan selama dekade terakhir dapat diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi regional.

Selain berperan dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, belanja daerah juga memiliki kontribusi penting terhadap penguatan sektor tenaga kerja. Dengan mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan, program pelatihan keterampilan, dengan menyediakan layanan Kesehatan sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, belanja daerah tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi secara langsung, tetapi juga menciptakan fondasi jangka panjang bagi pengembangan tenaga kerja yang berdaya saing.

Grafik 1. 6 Jumlah Penduduk Bekerja 5 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Juta Jiwa)



Sumber: Lampiran 1. Variabel Dependen dan Independen

Berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja di lima kabupaten /kota terpilih periode 2018–2023, terlihat tren yang cenderung meningkat meskipun mengalami fluktuasi di beberapa tahun. Kabupaten Bogor mencatat jumlah penduduk bekerja tertinggi sepanjang periode, yaitu mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa pada 2023, mencerminkan besarnya basis tenaga kerja di wilayah tersebut. Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi juga menunjukkan jumlah tenaga kerja yang cukup besar, masing-masing sekitar 1,21 juta jiwa dan 1,45 juta jiwa pada 2023. Sementara itu, Kota Bandung dan Kabupaten Karawang berada pada kisaran 1,1–1,2 juta pekerja. Meskipun pandemi COVID-19 pada 2020–2021 sempat menekan jumlah penduduk yang bekerja di beberapa daerah (terlihat dari penurunan di Kota Bandung dan Kabupaten Karawang), secara umum jumlah tenaga kerja kembali meningkat ditahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas penyerapan tenaga kerja di lima wilayah strategis ekonomi Jawa Barat masih cukup kuat, sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Pertumbuhan ekonomi mendapat manfaat dari peningkatan jumlah pekerja produktif, karena keterlibatan lebih banyak tenaga kerja akan meningkatkan kapasitas produksi. Menurut teori klasik, tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional dipengaruhi oleh tenaga kerja, modal, dan perkembangan teknologi yang merupakan faktor-faktor produksi (Sadono Sukirno, 2017). Oleh karena itu, analisis terhadap peran tenaga kerja dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk melihat seberapa efektif potensi SDM dimanfaatkan dalam pembangunan daerah.

Dalam teori pertumbuhan neoklasik, melalui peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas, tenaga kerja memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi, Dimana investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja terdiri dari orang-orang yang mampu bekerja dan berusia minimal 15 tahun demi mendorong produktivitas dalam proses produksi barang dan jasa.

Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia adalah Jawa Barat, yaitu lebih dari 49 juta jiwa (BPS, 2023). Jumlah penduduk yang besar ini menimbulkan dinamika ekonomi yang kompleks, seperti tingginya tingkat konsumsi, ketersediaan tenaga kerja yang melimpah, serta kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat. Dengan skala ekonomi yang luas, Jawa Barat menjadi pusat aktivitas konsumsi, investasi, dan tenaga kerja dalam skala besar. Penelitian ini difokuskan pada lima kabupaten/kota dengan kontribusi PDRB tertinggi di provinsi ini, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, dan Kota Bandung. Pemilihan kelima wilayah tersebut didasarkan pada peran strategisnya dalam mendorong aktivitas ekonomi provinsi melalui sektor industri, perdagangan, jasa, dan konsumsi rumah tangga, menjadikannya representasi utama perekonomian Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, terlihat bahwa konsumsi rumah tangga, PMDN, tenaga kerja, dan belanja daerah merupakan komponen-komponen utama yang memiliki keterkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Masing-masing variabel memiliki kontribusi strategis, baik dalam mendorong permintaan agregat, memperluas kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi ekonomi, maupun memperkuat daya saing daerah. Fenomena pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang mengalami fluktuasi, terutama selama dan pascapandemi, menunjukkan pentingnya untuk memahami bagaimana faktor-

faktor tersebut mempengaruhi laju pertumbuhan secara menyeluruh. Selain itu, Jawa Barat sebagai provinsi dengan populasi dan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia, menjadi representasi ideal untuk mengkaji dinamika ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti dengan judul “Analisis Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Penanaman Modal Dalam Negeri, Belanja Daerah, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota di Jawa Barat”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, permasalahan yang diambil:

1. Apakah Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lima Kabupaten /Kota di Jawa Barat?
2. Apakah Penanaman Modal dalam Negeri berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lima Kabupaten /Kota Jawa Barat?
3. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lima Kabupaten /Kota Jawa Barat?
4. Apakah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lima Kabupaten /Kota Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lima Kabupaten / Kota di Jawa Barat
2. Untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lima Kabupaten / Kota di Jawa Barat

3. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lima Kabupaten / Kota di Jawa Barat
4. Untuk menganalisis pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lima Kabupaten / Kota di Jawa Barat

1.4 Ruang Lingkup

Konsumsi rumah tangga, investasi domestik, pengeluaran regional, dan tenaga kerja merupakan faktor independen dalam penelitian ini, yang berfokus pada Provinsi Jawa Barat. Variabel dependen yang digunakan sebagai alat ukur adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan konsumsi rumah tangga, investasi domestik, pengeluaran regional, dan tenaga kerja sebagai variabel independen serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen sebagai alat ukur, ruang lingkup penelitian ini mencakup Provinsi Jawa Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini memperluas pengetahuan tentang dinamika pertumbuhan ekonomi di lima kabupaten dan kota di Jawa Barat.
2. Manfaat Praktisi, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi berbagai pihak, yaitu:
 - a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini menjadi sarana penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam kondisi nyata di lapangan.
 - b. Bagi Pemerintah atau Pembuat Kebijakan, hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Jawa Barat dalam menyusun strategi untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

- c. Untuk Peneliti Selanjutnya, studi ini dapat dijadikan dasar atau rujukan awal dalam memperluas penelitian serupa secara lebih rinci dan menyeluruh di masa yang akan datang.